



Analysis of the Social Development Program: Smart Kampung Program of Banyuwangi Regency

Alfian Mahendra*, Moch. Ilham Noer Sunan, Riska Nur Azizah, Shofira Nur Aliya P,
C Aliffiana F Jasmine, Falka Patria Senoaji
Master's Program in Social Welfare, Department of Social Welfare,
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Indonesia, Indonesia

Email correspondence : alfianmahendra189@gmail.com*

Abstract

Purpose : This study examines the Smart Kampung Program in Banyuwangi Regency through Midgley's social development framework, with particular attention to the integration of individual, community, and governmental roles in enhancing rural social welfare.

Design/methodology/approach : Employing a descriptive qualitative approach with a case study design, the research is based on a systematic literature analysis of peer-reviewed journals, official government reports, regional regulations, institutional publications, and other credible online sources. Data were analyzed using the interactive model proposed (Miles dkk., 2014), encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing and verification.

Findings : The findings reveal that the Smart Kampung Program has effectively combined technological innovation, governance reform, and community empowerment to improve public service delivery and citizen participation. Nevertheless, the integration among key actors remains uneven, particularly with regard to social sustainability and disparities in human resource capacities across villages.

Practical Implication : The study offers practical implications for local governments and policymakers in strengthening inclusive and sustainable rural development models grounded in social development principles.

Originality/value : The originality of this research lies in its application of Midgley's theoretical framework to analysis of the Smart Kampung Program, thereby contributing a novelty perspective to the discourse about social development on village level.

Keywords : Smart City, Social Development, Banyuwangi

Paper type : review paper

Analisa Program Pembangunan Sosial : *Smart Kampung* Kabupaten Banyuwangi

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan menganalisis Program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi melalui perspektif pembangunan sosial Midgley, dengan fokus pada integrasi peran individu, komunitas, dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desain/metodologi/pendekatan : Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus berbasis analisis studi literatur, mencakup jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, regulasi daerah, publikasi lembaga, serta sumber daring yang kredibel. Analisis data dilakukan melalui model interaktif (Miles dkk., 2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Temuan : Temuan penelitian menunjukkan bahwa Smart Kampung telah menggabungkan inovasi teknologi, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan layanan publik dan partisipasi warga. Namun demikian, integrasi peran antar aktor belum sepenuhnya merata, terutama pada aspek keberlanjutan sosial dan kesenjangan kapasitas desa.

Implikasi Praktis : Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dan perumus kebijakan untuk memperkuat model pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan berbasis pembangunan sosial

Originalitas/Nilai : Nilai orisinal penelitian terletak pada penggunaan kerangka teori Midgley dalam menganalisis Smart Kampung, yang menawarkan perspektif baru dalam kajian pembangunan sosial di tingkat desa.

Kata Kunci : Smart Kampung, Pembangunan Sosial, Banyuwangi

Jenis Penelitian : *Review Paper*

PENDAHULUAN

Pembangunan sosial di Indonesia pada era kontemporer dihadapkan pada tantangan dualistik yang kompleks, yakni percepatan transformasi digital yang masif di satu sisi dan persistensi ketimpangan spasial di sisi lain. Fenomena ini tergambar dari data survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet nasional telah menjangkau mayoritas penduduk, terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) yang tajam antara wilayah perkotaan yang mencapai angka penetrasi 82,2% dibandingkan wilayah pedesaan yang masih tertahan di angka 74%. Disparitas ini diperburuk oleh fakta bahwa kontribusi pengguna internet dari wilayah pedesaan hanya menyumbang sekitar 30,5% dari total populasi digital nasional, yang mengindikasikan adanya ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi dan informasi. Dalam perspektif teori pembangunan sosial, kondisi ketimpangan struktural semacam ini mencerminkan apa yang disebut oleh Midgley (1995) sebagai fenomena "pembangunan terdistorsi" (*distorted development*), mendefinisikan kondisi ini sebagai situasi di mana pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini ekonomi digital, terjadi secara pesat namun gagal disertai dengan kemajuan sosial yang setara bagi seluruh populasi. Distorsi ini bukan disebabkan oleh ketiadaan pembangunan ekonomi, melainkan akibat kegagalan dalam mengharmonisasikan tujuan ekonomi dan sosial, sehingga manfaat modernisasi hanya terkonsentrasi pada segmen tertentu di perkotaan dan secara sistematis meminggirkan masyarakat pedesaan dari akses terhadap layanan publik yang efisien dan kesejahteraan yang merata.

Merespons tantangan geografis dan kesenjangan akses tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan intervensi strategis melalui inovasi kebijakan daerah yang dikenal sebagai program "Smart Kampung". Sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa dengan wilayah mencapai 5.782 km² yang terdiri dari 189 desa dan 28 kelurahan, Banyuwangi menghadapi kendala jangkauan pelayanan publik yang sangat signifikan karena jarak antar desa yang berjauhan (Lazuardi & Hakim, 2025). Untuk mengatasi hambatan spasial ini, pemerintah daerah meluncurkan program Smart Kampung yang diatur secara legal formal melalui Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerapan Masterplan Smart City melalui Smart Kampung. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi integrasi teknologi serat optik dengan layanan sosial terpadu yang mencakup pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga penanggulangan kemiskinan (Suyatna dkk., 2023). Program ini dirancang dengan visi yang melampaui sekadar digitalisasi administrasi, melainkan sebagai instrumen pemerataan pembangunan yang menysar langsung ke akar rumput di tingkat desa untuk meningkatkan kemandirian wilayah (Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu, 2022).

Efektivitas intervensi negara melalui program Smart Kampung ini telah terbukti secara empiris melalui serangkaian data statistik kinerja pembangunan daerah yang positif. Berdasarkan data (BPS, 2024) Kabupaten Banyuwangi, tingkat kemiskinan berhasil ditekan ke angka historis terendah sebesar 6,54% pada Maret 2024, turun signifikan sebesar 0,80% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Keberhasilan intervensi ini juga terlihat dari stabilitas ekonomi daerah yang terjaga dengan pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka 5,03% pada tahun 2023, sebuah capaian yang didorong oleh efisiensi layanan dan kemudahan berusaha di tingkat desa. Dampak digitalisasi desa juga terlihat nyata dan masif pada sektor pariwisata, di mana kemudahan akses informasi dan pemasaran digital desa wisata berkontribusi pada lonjakan kunjungan wisatawan domestik yang mencapai lebih dari 3,2 juta jiwa dan wisatawan mancanegara sebanyak 122.904 jiwa sepanjang tahun 2024. Data-data kuantitatif ini mengonfirmasi bahwa intervensi teknologi yang tepat guna di tingkat desa mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian ini secara spesifik menyoroti implementasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai entitas masyarakat Provinsi Jawa Timur. Menurut Yakub dkk., (2025) Kabupaten Banyuwangi menghadapi tantangan ganda dalam menyeimbangkan modernisasi digital dengan pelestarian nilai-nilai kultural dan kearifan lokal. Program Smart Kampung tidak hanya berfungsi mendigitalisasi layanan administrasi kependudukan seperti surat pengantar atau akta kelahiran, tetapi juga memberdayakan komunitas melalui platform *e-commerce* lokal seperti Banyuwangi-mall.com dan pemasaran pariwisata digital yang masif (Lazuardi & Hakim, 2025). Integrasi teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk tetap mempertahankan identitas budaya mereka sembari berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital global, sebuah praktik yang menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat pelestarian budaya (*cultural preservation*) sekaligus pengungkit ekonomi.

Untuk menganalisis fenomena kompleks ini secara mendalam, penelitian ini menggunakan kerangka teori Pembangunan Sosial (*Social Development*) dari James Midgley. Menurut Midgley (1995), pembangunan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan ekonomi semata atau pelayanan sosial yang bersifat filantropis dan residual. Sebaliknya, pembangunan sosial seharusnya merupakan proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dalam hubungannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Teori ini menekankan prinsip "Investasi Sosial" (*Social Investment*), di mana pengeluaran untuk program sosial, seperti infrastruktur digital desa, pelatihan literasi, dan pemberdayaan UMKM, tidak dianggap sebagai beban konsumtif negara, melainkan

sebagai investasi produktif yang berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Midgley (1995) mengklasifikasikan tiga pendekatan strategis dalam pembangunan sosial yang relevan untuk membedah kasus ini. Pertama adalah Pendekatan Individu (*Individualist Strategy*), yang didasarkan pada ideologi individualisme atau liberalisme. Pendekatan ini memandang bahwa kesejahteraan sosial kolektif (*social welfare*) dapat tercapai ketika individu secara independen mengejar kepentingan pribadi mereka di pasar. Dalam konteks ini, pembangunan sosial menekankan pada peran individu yang secara aktif terlibat dalam wirausaha atau pengembangan aset pribadi tanpa banyak campur tangan negara. Kedua adalah Pendekatan Komunitas (*Communitarian Strategy*), yang berakar pada ideologi populis. Pendekatan ini mengakui adanya kapasitas inheren dalam masyarakat lokal untuk berorganisasi, memenuhi kebutuhan dasar kolektif, dan mengelola masalah mereka sendiri. Midgley meyakini bahwa pembangunan sosial dapat dicapai pada level meso melalui pemberdayaan komunitas, sehingga mereka mampu memberdayakan anggotanya secara kolektif tanpa ketergantungan penuh pada negara. Ketiga adalah Pendekatan Pemerintah (*Statist Strategy*), yang berakar pada ideologi kolektivis. Pendekatan ini memposisikan negara sebagai aktor utama yang memiliki tanggung jawab serta otoritas mutlak untuk memobilisasi sumber daya guna mempromosikan kesejahteraan semua warga negara. Melalui pendekatan ini, pemerintah melakukan intervensi pada level makro melalui mekanisme perencanaan sosial ekonomi terpadu, redistribusi sumber daya, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembangunan berkelanjutan.

Dari ketiga pendekatan strategis tersebut, penelitian ini berargumen bahwa implementasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi paling tepat dan komprehensif jika dianalisis menggunakan Pendekatan Pemerintah (*Statist Strategy*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada empat alasan fundamental yang saling berkaitan. Pertama, program ini didasari oleh sebuah kebijakan formal yang kuat, yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017. Keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa Smart Kampung tidak muncul secara organik dari inisiatif individu atau komunitas semata, melainkan merupakan produk intervensi kebijakan publik (*public policy intervention*) yang dirancang oleh negara untuk mengatur tata kelola desa secara sistematis (Suyatna et al., 2023). Kedua, program ini sangat erat kaitannya dengan konsep perencanaan sosial (*social planning*), di mana pemerintah memanfaatkan intervensi rasional di level makro untuk mengarahkan proses sosial-ekonomi secara terpadu. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara sadar mengintegrasikan sektor pelayanan publik (sosial) dengan sektor pariwisata dan UMKM (ekonomi) ke dalam satu ekosistem digital yang terpusat.

Alasan ketiga adalah kapasitas intervensi tersebut yang memposisikan pemerintah sebagai aktor utama untuk mengontrol dan memobilisasi sumber daya daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dianggap mampu mengharmonisasikan kebijakan sosial dan ekonomi serta melaksanakan program pembangunan skala besar, seperti pemasangan ribuan titik fiber optic ke desa-desa, yang tidak dapat dilakukan oleh individu ataupun komunitas secara mandiri karena keterbatasan biaya dan wewenang (Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu, 2022). Keempat, Smart Kampung merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah memimpin inisiatif pembangunan (government led development) melalui digitalisasi layanan, penguatan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas publik yang efisien. Pendekatan ini sejalan dengan konsep perencanaan terpadu Midgley (1995) karena secara aktif menggabungkan teknologi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial dalam satu kebijakan yang terkoordinasi dan terstruktur dari atas ke bawah namun tetap partisipatif.

Meskipun program Smart Kampung telah banyak dikaji dalam berbagai literatur, mayoritas studi sebelumnya cenderung bersifat parsial. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis implementasi e-government kepuasan pengguna layanan (Idoughi & Abdelhakim, 2018; Santa dkk., 2019; Tetteh dkk., 2023; Weerakkody dkk., 2016), atau peran literasi digital dalam pemberdayaan komunitas melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) (Hanna Nel, 2020; Nel dkk., 2023; Ward, 2023; Yakub dkk., 2025). Terdapat kesenjangan (gap) akademis yang signifikan di mana belum ada penelitian yang secara spesifik membedah program ini menggunakan pisau analisis pembangunan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Midgley (1995) yang menekankan pentingnya integrasi harmonis antara peran individu, komunitas, dan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif analitis yang lebih komprehensif untuk memahami sejauh mana Smart Kampung Banyuwangi selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan sosial serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti meninjau kerangka literatur yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mensintesis temuan penelitian (Fundoni dkk, 2023). Data penelitian dihimpun secara sekunder menggunakan studi literatur yang mencakup jurnal ilmiah, regulasi daerah, publikasi lembaga, serta sumber daring kredibel yang

berkaitan dengan Program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data sekunder yang relevan dan mutakhir sehingga dapat digunakan untuk menilai keterkaitan antara program Smart Kampung dengan kerangka teori pembangunan sosial. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada relevansinya dalam menganalisis fenomena sosial dan budaya, sebagaimana hal ini tercermin dalam program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, pendekatan ini efektif untuk memetakan kondisi terkini dalam bidang penelitian tertentu, mengidentifikasi kesenjangan, dan memberikan gambaran komprehensif tentang pengetahuan yang ada (Fakis dkk., 2014).

Objek penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi Program Smart Kampung yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi dan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan November hingga Desember 2025. Proses seleksi sumber dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga informasi yang diperoleh dipastikan kredibel dan relevan sebagai dasar analisis (Neuman, 2014). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dkk (2014) yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ditujukan untuk menyaring dan menyeleksi informasi sesuai fokus penelitian. Kedua, penyajian data ditujukan untuk menyusun data terpilih dalam uraian deskriptif yang runtut agar pola dan hubungan antar konsep dapat terlihat jelas. Terakhir, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis dan memverifikasinya untuk memastikan keabsahan sebelum digunakan sebagai dasar interpretasi. Penelitian ini dianalisis berdasarkan prinsip pembangunan sosial menurut Midgley (1995) dan ditujukan untuk dapat mengidentifikasi kontribusi program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa setiap desa memiliki otonomi untuk dapat mengurus berbagai urusan terkait dengan desanya termasuk dalam menciptakan inovasi yang bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai sektor krusial seperti pertanian, peternakan, usaha, dan bahkan layanan publik yang dimiliki desa. Setiap inovasi yang dimiliki dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dipadukan dengan teknologi. Perubahan dan inovasi tersebut tentunya diharapkan dapat memperbaiki, mempermudah, dan memaksimalkan berbagai sektor sehingga memudahkan masyarakat. Inovasi dapat diimplementasikan melalui program unggulan sebagai bentuk upaya strategis namun terukur sehingga mampu mencapai tujuan bersama.

Melalui kebijakan nasional terkait desa yang memberikan hak otonomi kepada desa dalam membuat inovasi, Kabupaten Banyuwangi memproyeksikan hal tersebut kedalam sebuah program desa berbasis digital. Program Smart Kampung, sebuah inovasi yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Inovasi program ini dirancang untuk mengatasi persoalan birokrasi desa yang pada saat itu dianggap belum efektif, ketimpangan akses layanan dasar, rendahnya efektivitas pelayanan publik, serta lemahnya pemberdayaan ekonomi lokal. Pada dasarnya pelayanan daring, dan penyediaan informasi melalui website merupakan bentuk upaya dalam menciptakan *smart governance* dalam konsep smart city sehingga dapat mempermudah dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Putra dkk., 2020).

Secara resmi program ini telah dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung sebagai regulasi awal untuk integrasi program kerja berbasis desa/kelurahan melalui Smart Kampung. Peluncuran Smart Kampung secara resmi diformalkan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017 (perubahan atas peraturan sebelumnya), yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program ini. Peraturan tersebut menetapkan struktur, mekanisme, standar pelayanan, serta indikator pembangunan Smart Kampung secara komprehensif. Peraturan ini memulai babak baru dalam pemerintahan kabupaten banyuwangi sebagai langkah awal dimulainya inovasi berbasis digital di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap berbagai penelitian terdahulu terkait program Smart Kampung menunjukkan bahwa program ini bukanlah hanya sekedar upaya imigrasi pelayanan desa menuju digitalisasi. Penelitian Ana Fitrianti dkk (2021) menunjukkan bahwa Smart Kampung mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi desa. Melalui inovasi teknologi dalam sistem informasi desa yang berbasis website dan aplikasi ternyata mampu mempercepat proses pelayanan administratif, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi kesalahan administrasi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu (2022), dimana warga desa tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh atau menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya. Selain itu, diketahui bahwa digitalisasi layanan desa membuat proses administrasi lebih akuntabel karena setiap transaksi pelayanan terekam dalam sistem secara real time. Diperkuat dengan penelitian Aji dkk (2024) menunjukkan aplikasi Smart Kampung Banyuwangi memberikan kontribusi sebesar 68,5% terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Banyuwangi yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara aplikasi Smart Kampung Banyuwangi

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik Banyuwangi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Sekarsari & Winarno, 2018) menegaskan bahwa Smart Kampung adalah sebuah wujud kemajuan sebuah sistem administrasi desa yang berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pada birokrasi mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Melalui pemanfaatan teknologi mampu membuat sistem birokrasi yang sebelumnya dianggap tidak efektif mampu teratasi sehingga segala bentuk urusan masyarakat menjadi lebih mudah untuk diselesaikan.

Sebagai program yang berbasis inovasi teknologi di layanan pemerintahan desa, digitalisasi layanan dasar menjadi aspek penting yang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Lintang Pamungkas (2020) menemukan bahwa Smart Kampung telah mempermudah berbagai akses yang krusial di luar pelayanan birokrasi desa, seperti terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, seni dan budaya, terutama melalui platform informasi desa yang terintegrasi dengan puskesmas dan sekolah setempat. Melalui inovasi tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi seperti jadwal posyandu, program bantuan pendidikan, hingga status layanan sosial melalui kanal digital yang dapat diakses dari mana saja. Hal ini memberikan dampak besar bagi masyarakat desa di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan pemerintah. Selain itu, informasi yang dihimpun hanya dalam satu website atau aplikasi memberikan masyarakat kemudahan untuk secara efektif mengakses informasi hanya melalui satu pintu. Kemudahan ini meminimalkan kebingungan informasi jika bersumber dari berbagai kanal.

Dari aspek pemberdayaan ekonomi, Smart Kampung juga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan UMKM dan desa wisata. Studi oleh Oktarina dkk (2023) dalam perspektif branding budaya menunjukkan bahwa digitalisasi desa mampu memperkuat posisi ekonomi desa melalui promosi potensi lokal. Melalui branding yang berbeda ini mampu menjadi daya tarik tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Desa-desanya di Banyuwangi memanfaatkan media digital untuk memasarkan produk khas, layanan pariwisata, seni budaya, serta kegiatan ekonomi lainnya. Melalui strategi digital branding, banyak desa yang berhasil meningkatkan pendapatan masyarakatnya dan memperluas pasar produk lokal secara nasional bahkan internasional. Selaras dengan hal tersebut, penelitian Kurniawati (2024) di Desa Tegaldlimo menunjukkan bahwa Smart Kampung tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi untuk pengembangan ekonomi. Mereka menyoroti bahwa berbagai pelatihan yang dilakukan pemerintah desa seperti kewirausahaan yang dipadukan dengan digitalisasi telah memperluas kemampuan warga dalam

memasarkan produk UMKM melalui marketplace, media sosial, dan platform digital lainnya.

Selain itu, Ardiyanto & Permatasari (2024) meneliti implementasi aplikasi Simas Mandiri, sebuah platform yang memungkinkan warga mengurus layanan administrasi secara mandiri dari rumah. Penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat partisipasi digital masyarakat meningkat secara signifikan sejak platform tersedia. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah warga dalam mengakses layanan, tetapi juga mendorong budaya birokrasi yang lebih responsif dan efisien di tingkat desa.

Tata kelola pemerintahan desa dalam Smart Kampung juga menjadi fokus banyak penelitian. Lesmanawaty & Wargadinata (2021) menekankan bahwa keberhasilan Smart Kampung sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah kabupaten, pemerintah desa, perangkat desa, pendamping desa, dan komunitas lokal. Sistem digital yang dikembangkan Smart Kampung memungkinkan aliran informasi yang cepat, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan monitoring pembangunan desa yang lebih transparan. Diperkuat dengan (Lazuardi & Hakim, 2025) juga menekankan komunikasi dan sosialisasi yang konsisten menjadi kunci utama keberhasilan program ini, sekaligus membangun pemahaman dan kepercayaan warga terhadap manfaat jangka panjang dari Smart Kampung dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya di desa.

Meski menunjukkan banyak keberhasilan, beberapa penelitian juga mencatat tantangan implementasi. Lazuardi & Hakim (2025) serta Choirul Saleh dkk. (2023) menunjukkan bahwa tantangan utama Smart Kampung meliputi keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah pinggiran, rendahnya literasi digital sebagian aparatur desa dan warga, serta ketergantungan besar pada anggaran pemerintah daerah. Tantangan ini harus menjadi perhatian penting mengingat program ini akan sulit dijalankan apabila sistem sumber pendukung berada pada posisi yang lemah. Program berbasis digital akan tidak dapat dimanfaatkan secara merata apabila faktor krusial seperti jaringan dan pemahaman terhadap aplikasi masih belum maksimal.

Berdasarkan studi literatur terkait smart kampung di kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan merupakan program pembangunan yang komprehensif dan memiliki dasar hukum yang kuat. Program ini bukan sekedar penyelarasan informasi atau hanya penyesuaian terhadap perkembangan zaman di era digital tetapi ini merupakan bentuk intervensi pemerintah sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pelayanan, memperbaiki sistem birokrasi yang pada akhirnya mendukung perekonomian masyarakat yang diharapkan mampu mencapai taraf sejahtera. Semua pencapaian tersebut menunjukkan peran sentral pemerintah sebagai aktor utama pembangunan melalui inovasi digital.

Program Smart Kampung dalam Pendekatan Pembangunan Sosial

Berbagai literatur terdahulu menunjukkan bahwa program ini sejalan dengan konsep pembangunan sosial. Kebijakan yang digunakan sebagai intervensi makro berhasil membuat sebuah program yang berdampak kepada efektivitas pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan pada sektor ekonomi. Program ini sangat mencerminkan bagaimana peran pemerintah sebagai policy maker sangat berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial. Hal tersebut sangat sejalan dengan teori Midgley (1995) terkait pembangunan sosial yang memaparkan bahwa pembangunan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan.

Menurut Midgley (1995) Pembangunan Sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat bukan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi saja, namun pembangunan sosial seharusnya yang efektif harus memadukan peran individu, komunitas, dan pemerintah dalam satu kerangka yang harmonis hingga mampu berimplikasi pada sektor ekonomi. Melalui pemahaman tersebut maka dalam pembangunan sosial yang dikemukakan oleh Midgley (1995) terdapat 3 pendekatan seperti berikut:

1. Individualist

Pendekatan ini didasarkan pada ideologi individualisme yang memandang bahwa kesejahteraan sosial kolektif (*social welfare*) dapat tercapai ketika individu secara independen mengejar kepentingan pribadi mereka. Sehingga pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan sosial tak terlepas dari peran individu yang secara aktif terlibat dalam berbagai program pembangunan sosial.

2. Communitarian

Berakar pada ideologi populis, pendekatan ini mengakui adanya kapasitas dalam masyarakat untuk berorganisasi, memenuhi kebutuhan dasar kolektif dan mengelola masalah mereka sendiri. Midgley meyakini bahwa pembangunan sosial dapat dicapai pada level meso melalui pemberdayaan komunitas sehingga mampu memberdayakan anggotanya secara kolektif.

3. Statist

Berakar pada ideologi kolektivis yang memposisikan negara sebagai aktor utama yang memiliki tanggung jawab serta otoritas untuk memobilisasi sumber daya guna mempromosikan kesejahteraan semua warga negara. Melalui pendekatan ini pemerintah dapat melakukan intervensi pada level

makro melalui perencanaan sosial ekonomi terpadu, redistribusi sumber daya, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pendekatan yang dipaparkan oleh Midgley (1995) salah satu yang mendekati dengan konsep program Smart Kampung adalah Social Development yang pendekatannya melalui government. Berdasarkan berbagai temuan pada literatur terdahulu program ini memiliki akar hukum yang kuat sebagai fondasi pembentukan program yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 yang diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Smart Kampung. Dalam hal ini menekankan bahwa program pembangunan sosial tak terlepas dari andil pemerintah yang cukup kuat sebagai aktor kunci dalam kebijakan dan pelaksanaan program. Hasil analisa menggunakan teori pembangunan sosial dari Midgley (1995), Smart Kampung Banyuwangi merupakan contoh konkret bagaimana pembangunan sosial dapat diwujudkan melalui pendekatan pemerintah (statist approach). Dalam pendekatan ini, negara memiliki otoritas terbesar dalam merencanakan pembangunan, memobilisasi sumber daya, mengintegrasikan kebijakan sosial dan ekonomi, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Dalam kerangka Midgley (1995), perencanaan terpadu adalah salah satu elemen utama pembangunan sosial. Perencanaan terpadu tersebut tampak jelas melalui regulasi formal berupa Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 yang memuat arah kebijakan, strategi, dan indikator pembangunan sosial berbasis teknologi informasi. Kebijakan ini secara langsung menunjukkan peran pemerintah sebagai perencana utama pembangunan di tingkat desa. Perencanaan terpadu ini juga termuat dalam master plan smart city Banyuwangi smart kampung 2017. Termuat Arah kebijakan dari program smart city tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan layanan publik, memperkecil kesenjangan akses antara wilayah kota dan desa, dan memperkuat partisipasi masyarakat melalui teknologi informasi. Kemudian ditetapkan pula strategi pembangunan sosial berbasis TIK yang disusun mengikuti enam dimensi Smart City nasional. Strategi tersebut meliputi Smart Governance, Smart Living & Smart Society, Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Branding. Strategi ini menunjukkan bahwa Smart Kampung tidak hanya soal teknologi, tetapi merupakan rencana pembangunan sosial yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Gede Gusta Ardiyasa & Ety Rahayu (2022) menjelaskan adanya intervensi makro yang kemudian berdampak ke tingkat mikro dan meso (*Top Down*). Hal tersebut tercermin bahwa implementasi dari perencanaan terpadu dilakukan secara terstruktur melalui sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten

sehingga pemerintah desa hanya tinggal mengimplementasikannya. Hal ini mempertegas bahwa peran pemerintah dalam program pembangunan ini cukup besar.

Dalam *developmental by governance* ini Midgley juga menekankan pentingnya redistribusi untuk mengurangi ketimpangan sosial. Berdasarkan hasil studi Choirul Saleh dkk (2023) menunjukkan bahwa aplikasi layanan desa memperluas akses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi secara merata, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa melalui pemanfaatan digitalisasi konsep redistribusi dapat diterapkan. Ketimpangan dalam mendapatkan akses pelayanan yang merata dapat diatasi dengan digitalisasi, tidak ada lagi desa yang tertinggal karena pelayanan berbasis teknologi menghapus hambatan geografis dan birokratis. Hal ini menegaskan bahwa Smart Kampung mewujudkan redistribusi melalui pemerataan akses layanan dasar ke desa-desa terpencil melalui teknologi digital. Namun, perlu diperhatikan hambatan masih tetap terjadi dimana menurut Ascarya & Harmawan (2025) hambatan seperti rendahnya literasi digital dan stabilitas sistem masih menghalangi pemerataan ini, oleh karenanya diperlukan perhatian khusus untuk menangani redistribusi ini sehingga pemerataan program dapat dilakukan dengan maksimal.

Midgley (1995) juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar. Aspek ini menjadi aspek penting dalam teori Midgley. Jika merujuk pada master plan 2017 terkait smart city arah kebijakan dalam program ini sudah merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Smart Kampung menyediakan layanan dasar berbasis digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan administratif, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan informasi desa secara lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, pemerintah berperan aktif memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama kelompok yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan pemerintah.

Perlu adanya konsep pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan gagasan yang dikemukakan Midgley, pembangunan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pada program smart kampung ini konsep keberlanjutan sangat terproyeksikan dalam aspek budaya yang kemudian diambil sebagai daya tarik utama. Hasilnya banyak wisatawan yang tertarik untuk datang langsung ke desa sehingga perekonomian masyarakat desa menjadi meningkat. Disatu sisi budaya yang dijadikan sebagai daya jual secara tidak langsung ikut dilestarikan sebagai aset penting untuk keberlanjutan program. Hasil studi literatur seperti penelitian Oktarina dkk (2023) menunjukkan bahwa desa-desa di Banyuwangi memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan wisata budaya dan alam secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Program ini juga

memperkuat identitas budaya lokal, sehingga pembangunan tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi tetapi juga keberlanjutan sosial.

Dibalik keberhasilan implementasi program ini, kekurangan tentunya masih terdapat pada beberapa aspek. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa jika dilihat dari alur pembangunan secara *Top Down*, dapat dibenarkan bahwa program ini didominasi oleh pemerintah. Namun, berdasarkan penelitian Pamungkas (2020) menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebijakan partisipasi masyarakat sangat minim, hal ini pada akhirnya memunculkan ketidaksesuaian rencana program dengan kebutuhan masyarakat atau kriterianya tidak sesuai. Hal ini memunculkan beberapa polemik yang menekankan bahwa seharusnya perencanaan program smart kampung seharusnya mampu melibatkan masyarakat secara aktif, begitupun dalam implementasinya. Midgley (1995) menekankan bahwa pembangunan sosial bukan hanya persoalan pemerintah namun juga kelompok dan individu yang harus terlibat aktif sehingga program dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian Ascarya & Harmawan (2025) yang menegaskan meskipun keberhasilan penuh, program ini masih memerlukan peningkatan partisipasi dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi yang mendorong inovasi, fleksibilitas, dan kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif.

Dengan demikian, Smart Kampung Banyuwangi adalah manifestasi nyata dari pembangunan sosial berbasis pendekatan pemerintah menurut Midgley. Pemerintah bertindak sebagai perencana, pelaksana, penyedia sumber daya, dan pengendali pembangunan yang memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui inovasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Smart Kampung tidak hanya modernisasi layanan, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan memperkuat kohesi sosial dalam kerangka negara kesejahteraan modern.

Melalui penelitian ini dapat dipertimbangkan secara teoritis bahwa penelitian ini telah memperkuat relevansi antara program smart kampung banyuwangi dengan teori social development midgley (1995), khususnya pendekatan *statist* dan keterkaitannya dengan pembangunan desa berbasis digital. Selain itu, melalui penelitian ini dapat memperluas konteks penerapan teori kearah yang lebih kompleks sehingga dapat secara adaptif menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Penerapan teori bukan hanya terkait dengan kebijakan sosial dan pembangunan pada level makro saja, namun juga relevan untuk menganalisis tata kelola desa berbasis digital berikut dengan pentingnya peran aktor pemerintahan beserta kontribusi masyarakat. Sehingga, menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial demi kesejahteraan masyarakat masa kini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris, Program Smart Kampung Banyuwangi dapat berfungsi sebagai instrumen dalam pembangunan sosial yang efektif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa, melalui peningkatan akses layanan publik, efisiensi tata kelola desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan berbasis digital yang relevan dengan perkembangan zaman serta diterapkan secara inklusif. Dalam artian dapat mengedepankan kebutuhan masyarakat lokal tanpa merusak nilai murni masyarakat, tetapi tetap mempertimbangkan kemajuan masa kini. Namun, penerapannya juga perlu mempertimbangkan penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program pembangunan desa melalui smart kampung di kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah program yang berorientasi pada peningkatan layanan publik, memperkecil kesenjangan akses antara wilayah kota dan desa, dan memperkuat partisipasi masyarakat melalui teknologi informasi. Strategi pembangunan sosial ini berbasis TIK yang disusun mengikuti enam dimensi *Smart City* nasional. Strategi tersebut meliputi *Smart Governance*, *Smart Living & Smart Society*, *Smart Economy*, *Smart Environment*, dan *Smart Branding*. Strategi ini menunjukkan bahwa Smart Kampung tidak hanya soal teknologi, tetapi merupakan rencana pembangunan sosial yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini memiliki fondasi hukum formal yang kuat yaitu peraturan bupati nomor 60 tahun 2017 yang menjadi kebijakan sebagai intervensi pemerintah dalam pembangunan daerah. Melalui program tersebut diketahui bahwa program ini sangat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Midgley (1995) dimana program ini adalah pembangunan sosial yang menggunakan pendekatan *statist*. Program ini telah mengimplementasikan perencanaan sosial, redistribusi sumber daya, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui program ini dapat terlihat bahwa pengaruh peran pemerintah sebagai aktor dalam pembuatan kebijakan memiliki andil yang besar terutama dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan penghapusan ketimpangan. Namun sayangnya, program yang bersifat *Top Down* ini belum begitu banyak partisipasi masyarakat misalnya dalam perumusan program. Oleh karenanya dibutuhkan program tambahan yang memastikan masyarakat terlibat aktif, karena pembangunan sosial yang maksimal bukan hanya dari pemerintah namun harus ada andil individu dan komunitas.

Secara teoritis penelitian ini telah menegaskan relevansi teori antara program smart kampung banyuwangi dengan teori social development midgley (1995), khususnya pendekatan *statist* dan keterkaitannya dengan pembangunan desa berbasis digital. Penelitian dapat memperluas konteks penerapan teori kearah yang lebih kompleks bukan hanya kebijakan sosial dan pembangunan sosial, namun juga dapat pada level pembangunan desa berbasis digital. Sedangkan secara empiris penelitian ini dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi pemerintah desa dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan berbasis digital yang relevan dengan perkembangan zaman, dimana dapat menjadi instrumen penting dalam upaya pembangunan sosial yang efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* yang mengandalkan sepenuhnya pada ketersediaan data sekunder sebagai instrumen analisis utama. Keterbatasan akses terhadap data primer dari lapangan dan interaksi langsung dengan informan kunci membatasi kapasitas penelitian pada kedalaman analisis empiris. Tanpa adanya data primer dari wawancara mendalam dan observasi terhadap pemangku kepentingan serta masyarakat desa, kajian ini memiliki keterbatasan dalam mengonfirmasi konsistensi antara kebijakan formal dengan praktik sosial yang berkembang dalam dinamika komunitas pedesaan.

Selama proses penelitian dan penulisan dilakukan, ditemukan bahwa limitasi penelitian ini belum memberikan ruang yang cukup untuk menjelaskan mengenai aspek keberlanjutan sosial jangka panjang. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data primer agar dapat mengeksplor bagaimana integrasi peran antar aktor sosial dalam pembentukan kohesi sosial pada Program Smart Kampung serta menjelaskan secara detil mengenai dinamika komunitas yang terjadi.

REFERENCES

- Aji, T. P. C. P., Antarini, L., & Seudemen, I. W. (2024). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. *Jurnal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 12(1), 84-100. <https://doi.org/https://doi.org/10/22225/jcpa.4.1.2024.45-57> PENGARUH
- Ana Fitrianti, A., Cellindita, S., & Pramnesti, K. (2021). Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.438>
- Apjii. (2024). *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2023-2024*.
- Ardiyanto, R., & Permatasari, S. J. (2024). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Simas Mandiri (Sistem Masyarakat Melayani Sendiri) Dalam Mewujudkan Smart Kampung (Studi Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi). *Nusantara Hasana Journal*, 3(9), Page. <https://www.nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1092>
- Ascarya, P. G., & Harmawan, B. N. (2025). *Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan*

- Nganjuk Smart City Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. 10(4), 706–724.
- BPS. (2024). *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2024*.
- Choirul Saleh, Ibad, S., Mindarty, L. I., & Hariyono, B. S. (2023). Public service innovation process of smart kampung program at Banyuwangi. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 7(1), 229–248. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i1.5854>
- Gede Gusta Ardiyasa, & Ety Rahayu. (2022). Implementasi Kebijakan Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 712–728. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2863>
- Hanna Nel. (2020). STAKEHOLDER ENGAGEMENT: ASSET-BASED COMMUNITY-LED DEVELOPMENT (ABCD) VERSUS THE TRADITIONAL NEEDS-BASED APPROACH TO COMMUNITY DEVELOPMENT. *Social Work/Maatskaplike Werk*, 56(2), 0–3. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.15270/56-3-857> STAKEHOLDER
- Idoughi, D., & Abdelhakim, D. (2018). Developing countries e-government services evaluation identifying and testing antecedents of satisfaction Case of Algeria. *International Journal of Electronic Government Research*, 14(1), 63–85. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2018010104>
- Kurniawati, dkk. (2024). Implementasi Program Smart Kampung Pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan ...*, 124–129. <https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi/article/view/59%0Ahttps://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi/article/download/59/25>
- Lazuardi, A. F., & Hakim, M. L. (2025). Implementasi Program “Smart Kampung” di Desa Sukojati Pada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Governance and Policy*, 5(2), 296–307. <https://jgpfisip.ub.ac.id/index.php/jgp/article/view/65>
- Lesmanawaty, E., & Wargadinata. (2021). *The Leadership Role in The Smart-Village Program in Banyuwangi District, East Java* Author: 13(1), 79–93. <https://doi.org/10.33701/jtp.v13i1.1429>
- Lintang Pamungkas, N. (2020). Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Transformative*, 6(1), 48–71. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3>
- Midgley, J. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. In *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage publications. <https://doi.org/10.4135/9781446221839>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nel, H., Mansvelt, N., & Yolisa Shugu. (2023). PERCEPTIONS OF SOCIAL WORK STUDENTS REGARDING THE ASSET-BASED COMMUNITY-DRIVEN DEVELOPMENT (ABCD) AFRICAN STUDY. *Social Work / Maatskaplike Werk Vol 50 No 2 ; Issue 7 Social Work / Maatskaplike Werk 2015 : 51 (1)*, 59(7), 228–247. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0003-1187-0450>
- Neuman. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*

- (Pearson).
- Oktarina, A., Mawardi, S., Pertiwi, C., Fitriana, N., & Adwiyah, R. (2023). *Innovation In Tradition: Exploring Banyuwangi's Smart Village as A Cultural City Brand*. 49(1), 81-92.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung, 17 Вестник Росздравнадзора 5 (2016).
- Putra, B. A. P., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Transformasi E-Government Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi Website Sebagai Perwujudan Smart Governance Kota Jogja. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 24-29. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1025>
- Santa, R., MacDonald, J. B., & Ferrer, M. (2019). The role of trust in e-Government effectiveness, operational effectiveness and user satisfaction: Lessons from Saudi Arabia in e-G2B. *Government Information Quarterly*, 36(1), 39-50. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.10.007>
- Sekarsari, R. W., & Winarno, T. (2018). Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi Dan Manajemen Di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p82-87>
- Suyatna, S., Garpy, P. F., & Nur Holifa, E. (2023). Kebijakan Sistem Smart Kampung Terhadap Percepatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(1), 31-38. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i1.15>
- Tetteh, J. E., Haizel-Commeh, J., & Otchere-Ankrah, B. (2023). Online Service Quality of State Organizations: A Study of Online Services of Ghana Revenue Authority. *Journal of Internet Commerce*, 22(4), 538-566. <https://doi.org/10.1080/15332861.2022.2109877>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. Nomor 6 Tahun 2014, 45 (2016). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung. *Jurnal Good Governance*, Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., Nugroho, A. A. <https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.460>
- Ward, S. (2023). Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. *Community Development Journal*, 58(2), 206-224. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab046>
- Weerakkody, V., Irani, Z., Lee, H., Hindi, N., & Osman, I. (2016). Are U.K. Citizens Satisfied With E-Government Services? Identifying and Testing Antecedents of Satisfaction. *Information Systems Management*, 33(4), 331-343. <https://doi.org/10.1080/10580530.2016.1220216>
- Yakub, M., Fanshoby, M., Kusmiati, Y., Khoirotnun Nisa, P., Zakaria, Z., & Romlah, S. (2025). Membangun Smart Kampung: Penerapan Pendekatan ABCD di Rumah Literasi Indonesia Banyuwangi. *Intizar*, 31(1), 15-21. <https://doi.org/10.19109/intizar.v31i1.27584>